

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hidup, masing-masing orang kadang memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka saling bertentangan, yang kadang menimbulkan suatu sengketa untuk menghindarkan gejala tersebut, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam praktik sering dijumpai pelaksanaan pembahagian warisan ditunda-tunda dan harta dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, maka akibatnya sewaktu mau dibagi harta warisan, sebahagian harta warisan tersebut masih dikuasai oleh sebahagian ahli waris.

Dalam sengketa hak milik dan keperdataan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan ekonomi syari'ah dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dalam pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa :

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud pasal 49.¹

¹ M. Yahyah Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hl. 881

Yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah merealisasi isi putusan pengadilan dengan mewajibkan pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam putusan. Dan apabila dalam isi putusan tersebut pihak tergugat tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut, setidaknya bagi pihak tergugat yang diperintahkan untuk menyerahkan barang, akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi

- a. Tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan tersebut, tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Terhadap kemungkinan pertama ini, bagi penggugat tidak ada masalah lagi, karena apa yang telah diinginkan telah terpenuhi.
- b. Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan hakim. Terhadap kemungkinan kedua ini, apabila penggugat menginginkan isi putusan dijalankan, maka dia harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Namun apabila sampai putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap tergugat tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela, maka penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut. Atas dasar permohonan eksekusi inilah ketua pengadilan akan memulai menjalankan isi putusan secara paksa terhadap tergugat.

Dalam pelaksanaan eksekusi suatu putusan pengadilan, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai bunyi amar putusan. Karena itu, amar putusan menjadi obyek yang penting untuk dibahas. Amar atau diktum merupakan pernyataan (deklaratif) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang obyek yang bersengketaan. Dan

juga berisi perintah atau penghukuman atau condemnatoir yang ditimpahkan kepada pihak yang berperkara.²

Pada masa belakangan ini persoalan tentang eksekusi sudah merupakan masalah ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia penegakan hukum. Dan dalam perkembangannya, praktek peristiwa hukum tumbuh melampaui batas ketentuan hukumnya. Hal ini mempengaruhi jenis dan ragamnya perkara yang masuk ke pengadilan untuk diselesaikan, seperti tidak ada larangan membangun rumah permanen diatas tanah milik orang lain, suami atau mertua misalnya, sementara ketentuan eksekusi tidak mengatur secara khusus untuk pembagian rumah permanen yang dibangun diatas tanah orang lain tersebut. Ketentuan eksekusi hanya mengatur secara umum saja. Hal demikian akan mempersulit eksekusi terhadap obyek yang demikian.

Undang-Undang Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 memberi hak kepada umat Islam untuk memilih pengadilan dalam menyelesaikan perkara waris, dan umat Islam yang kuat imannya yang mau menyelesaikan secara syariat Islam di Pengadilan Agama.

Dalam praktik sering dijumpai pelaksanaan pembahagian warisan ditunda-tunda dan harta dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, maka akibatnya sewaktu mau dibagi harta warisan, sebahagian harta warisan tersebut masih dikuasai oleh sebahagian ahli waris.

Kronologis perkara ini adalah bahwa dalam perkawinan yang dilakukan H. M. Irsyad bin Tosah yang telah meninggal dunia dengan Hj. Siti Maimunah yang juga telah meninggal dunia, bahwa perkawinan mereka tidak di karuniai anak maka dari itu almarhum mengangkat seorang anak yang bernama H. Faisol bin H. Nur Asidin (Tergugat) sedangkan H.

² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hl. 811

M. Irsyad bin Tosah (almarhum) dan Hj. Siti Maimunah (almarhumah) masih memiliki keluarga yang sekarang menjadi Para Penggugat merasa bahwa harta waris yang seharusnya dibagikan tidak dipenuhi oleh H. Faisol bin H. Nur Asidin (Tergugat). Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kab Malang.

Melihat hal tersebut di atas, perlu dikaji bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Harta Warisan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkara permohonan eksekusi putusan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab. Mlg?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan eksekusi Pengadilan Agama kab. Malang Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang melandasi penulisan ini, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana hakim dalam mengambil keputusan untuk proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang.
2. Untuk Mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Kab Malang dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang diajukan oleh Para Penggugat.

D. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat yang dapat di petik dari penulisan ini, Yaitu penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dalam ilmu acara perdata dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas

mengenai kewenangan Pengadilan Agama Kab Malang dalam penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapula kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan penulis sendiri dan mengembangkan pola pikir, khususnya yang berkaitan dengan proses eksekusi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai sengketa kewarisan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan legal study, yaitu melihat penegakan hukum dan proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Kab Malang. Serta melakukan wawancara dan pengumpulan data

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun alasan kenapa melakukan penelitian dikarenakan obyek sengketa tersebut berada di kawasan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Serta sumber data yang dibutuhkan berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu karena perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kab. Malang sangat beragam serta banyak.

3. Sumber Data

a) Data Primer

- 1) Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor:1526/Pdt.G/2008/PA.Kab Mlg.
- 2) Permohonan Eksekusi Perkara Nomor:1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

- 3) Wawancara terhadap Majelis Hakim yang menangani perkara Nomo:1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg dan wawancara kepada Penggugat (Advokad) yang berkaitan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis dan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun data sekunder ini menurut Gregory Churchill dalam bukunya Soerjono Soekanto dapat dibagi menjadi³ :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus ensiklopedia, majalah-majalah dan studi website atau penelusuran internet yang terkait dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh Pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab Mlg, yang berkenaan dengan proses penelitian dan penelusuran perundang-undangan.

³ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. Hal 151.

- b. Wawancara atau interview yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung pada Majelis Hakim yang mengadili perkara Eksekusi Harta Warisan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg.
- c. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur dan majalah-majalah.
- d. Penelusuran Internet atau studi website yaitu dalam penelitian ini penulis menelusuri bahan-bahan, literature yang menunjang dari internet.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dengan baik primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan analisis secara dengan menggunakan metode secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan waris.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalambab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian pustaka.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.